

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Alam, A.S. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Alatas, Syed Hussein. 1983. *Sosiologi korupsi Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*. Jakarta: LP3ES.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arief, Barda Nawawi. 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Atmasasmita, Romli. 1983. *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Bina Cipta.
- B, Simanjuntak dan Ali, Chairil. 1980. *Cakrawala Baru Kriminologi*. Bandung: Trasito.
- Chaerudin, dkk. 2009. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refika Aditama.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1983. *Pungli: Analisa Hukum & Kriminologi*, cetakan ke-2. Bandung: Sinar Baru.
- Hamzah, Andi. 2001. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Balai Aksara.
- _____. 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2008. *Hukum Acara Pidana Edisi Revisi Total*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2010. *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP*. Jakarta: PT. Warsif Watampone.
- Harahap, M. Yahya. 1998. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP (Jilid I dan Jilid II)*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- _____. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.

- _____. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan) Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- HT, Sulistyantoro. 2004. *Etika Kristen dalam Menyikapi Korupsi*. Kompas.
- Husni, H. 1960. *Kitab Himpunan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Departemen Penerangan Republik Indonesia.
- Kansil, C.S.T. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Lamintang, P.A.F. 1991. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Pionir Jaya.
- _____. 2006. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2009. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lindsey, Timothy. 2002. *Corruption in Asia: Rethinking the Governance Paradigm*. Sydney: The federation press.
- Lopa, Baharudin. 2001. *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Loqman, Lobby. 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia (Suatu Ikhtisar)*. Jakarta: Datacom.
- Makarao, Mohammad Taufik dan Suharsil. 2002. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moeljatno. 1976. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Yogyakarta: tanpa penerbit.
- Nugroho, Hibnu. 2012. *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Media Prima Aksara.
- Poernomo, Bambang. 1988. *Pola Dasar Teori dan Azas Umum Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Pope, Jaremy. 2003. *Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional*. Jakarta: Yayasan Obormas Indonesia.
- Rommelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- R.H, Soemitro. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Revida, Erika. 2003. *Korupsi Di Indonesia: Masalah dan Solusinya*. Medan: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara.

Sinambela, Lijan Poltak. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

_____. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soerodibioto, Soenarto. 1979. *KUHP dilengkapi arrest-arrest Hoge Rand*. Jakarta: tanpa penerbit.

Soesilo, R.1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.

Sudarta. *40 Tahun Oom Pasikom*. Jakarta: Buku Kompas.

Syani, Abdul. 1987. *Sosiologi Kriminologi*. Bandung: Remaja Karya.

Tunggal, I.S. dan Tunggal A.W. 2000. *Audit Kecurangan dan Akuntansi Forensik*, Jakarta: Harvarindo.

Wijayanto, dkk. 2010. *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

B. Karya Ilmiah

Gunawan, Gilang Andhika. 2013. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Pungutan Liar Kepada Pengemudi Angkutan Daerah*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. 2011. *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kemendikbud.

Putra, Muslim B. 2013. *Pungli Dalam Pelayanan Publik*. Makassar: Harian Fajar.

Sanusi, Achmad, dkk. 2002. *Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Korupsi Pada Pengelolaan APBN/APBD*. Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Tim Pengkajian SPKN 2002.

Sutomo. 2007. *Handout Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Fakultas Hukum Airlangga.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945.

_____. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

_____. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

_____. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

_____. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

_____. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

_____. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

_____. Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

_____. Inpres Nomor 9 Tahun 1977 tentang Operasi Penertiban.

_____. Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

_____. Inpres Nomor 9 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

D. Dokumen

Rencana Aksi Satgas Spu Bersih Pungli Kabupaten Purbalingga Januari s/d Desember T.A. 2017.

E. Sumber Lain

<http://www.kajianpustaka.com/2016/10/pungutan-liar-pungli.html> diakses pada tanggal 11 November 2016 pukul 10.00.

<http://presidenri.go.id/topik-aktual/reformasi-hukum-dan-filosofi-saberpungli.html> diakses pada tanggal 11 November 2016 pukul 10.00.

<http://kbbi.web.id/reformasi> diakses pada tanggal 11 November 2016 pukul 10.00.

<http://solosatoe.blogspot.co.id/2012/06/reformasi-hukum-di-indonesia.html> diakses pada tanggal 11 November 2016 pukul 10.00.

<http://www.kajianpustaka.com/2016/10/pungutan-liar-pungli.html> diakses pada tanggal 11 November pukul 10.00.

<http://nasional.kompas.com/read/2016/10/24/07121481/pemberantasan.pungli.upaya.mendapat.kepercayaan.publik.dan.penegakan.hukum> diakses pada tanggal 10 Desember pukul 15.00.

<http://www.suduthukum.com/2016/10/pungutan-liar-dalam-kuhp.html> diakses pada tanggal 10 Desember 2016 pukul 15.00.

<http://nasional.kompas.com/read/2016/10/11/20413781/ada.tujuh.sasaran.yang.ingin.dicapai.jokowi.melalui.paket.reformasi.hukum> diakses pada tanggal 18 Januari 2017 pukul 10.00.

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/10/161011_indonesia_kemenhub_suap diakses pada tanggal 18 januari 2017 pukul 10.00.

<http://septianludy.blogspot.co.id/2014/07/pencegahan-dan-upaya-pemberantasan.html>, diakses pada tanggal 18 Januari 2017 pukul 10.00.

<http://www.suduthukum.com/2016/10/pengertian-pungutan-liar.html> diakses pada tanggal 5 Februari 2017 pukul 16.00.

www.bappenas.go.id/get-file-server/node/6882/ diakses pada tanggal 5 Februari 2017 pukul 16.00.

<http://www.ukp.go.id/profil/pengawasan-pembangunan-nasional/37-92011-> diakses pada tanggal 5 Februari 2017 pukul 16.00

<http://presidenri.go.id/topik-aktual/reformasi-hukum-dan-filosofi-saberpungli.html> diakses pada tanggal 5 Februari 2017 pukul 16.00.

https://id.wikipedia.org/wiki/Pungutan_liar#cite_note-10 diakses pada tanggal 5 Februari 2017 pukul 16.00.

<https://tirto.id/presiden-beri-waktu-tiga-bulan-bagi-satgas-saber-pungli-bYEE> diakses pada tanggal 5 Februari 2017 pukul 16.00.

<http://harian.analisadaily.com/opini/news/awas-terjebak-satgas-saber-pungli/266901/2016/11/08> diakses pada tanggal 5 Februari 2017 pukul 16.00.

<http://baranews.co/blog/2017/01/18/dalam-2-bulan-satgas-saber-pungli-terima-22-ribu-lebih-laporan-dan-lakukan-81-ott/> diakses pada tanggal 5 Februari 2017 pukul 16.00.

<http://ksp.go.id/saber-pungli-langkah-serius-pemerintah-berantas-pungli/> diakses pada tanggal 5 Februari 2017 pukul 16.00.

<https://parismanalush.blogspot.co.id/2014/09/pengertian-unsur-menyalahgunakan.html> diakses pada tanggal 20 Maret 2017 pukul 10.00.

<http://sarmyendrahendy.blogspot.co.id/2012/06/dalamrealitakehidupan-bermasyarakat.html> di akses pada tanggal 20 Maret 2017 Pukul 10.00.

<http://adieynugroho.blogspot.co.id/2013/12/korupsi.html>, diakses pada tanggal 20 Maret 2017 pukul 10.00.

Data Primer diolah dari hasil wawancara Waluyo selaku Bintara Administrasi Seksi Pengawas (Bamin Siwas) di Polres Purbalingga. Pada tanggal 28 Februari 2017. Lokasi di Polres Purbalingga.

Data Primer diolah dari hasil wawancara M. Nurachman A, SH., MH. selaku Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Purbalingga. Pada tanggal 28 Februari 2017. Lokasi di Kejaksaan Negeri Purbalingga.